



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya honorarium Sekretaris Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Gaji, Aset pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan standar biaya honorarium Sekretaris Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan/SISMIOP PBB-BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah, Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota, Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah, serta Honorarium Tenaga Penyuluh Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 14B

- (1) Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 14C

- (1) Tenaga Penyuluh Hukum dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tenaga Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran VIII angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf D dan huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...17....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 43
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	350.000,-
2.	Penanggungjawab	OH	300.000,-
3.	Koordinator	OH	250.000,-
4.	Ketua	OH	225.000,-
5.	Sekretaris	OH	200.000,-
6.	Anggota	OH	150.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM EVALUASI, KAJIAN DAN TELAAH
PRODUK HUKUM DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OH	200.000,-
2.	Sekretaris	OH	175.000,-
3.	Anggota	OH	150.000,-
4.	Kesekretariatan	OH	100.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH HUKUM

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Penyuluh Hukum	OH	150.000,-

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN, GAJI, ASET PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD).

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)		
			Simda Keuangan	Simda Gaji	Simda Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ketua	OB	2.000.000	-	-
2.	Wakil Ketua	OB	1.750.000	-	1.750.000
3.	Sekretaris	OB	1.600.000	-	-
4.	Supervisor	OB	1.500.000	-	1.500.000
5.	Administrator	OB	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Operator PNS	OB	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Operator Non PNS	OB	750.000	750.000	750.000

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PENDAPATAN/SISMIOP PBB-BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
			SIMDA Pendapatan/SISMIOP PBB-BPHTB
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Wakil Ketua	OB	850.000
3.	Sekretaris	OB	800.000
4.	Supervisor	OB	750.000
5.	Administrator	OB	600.000
6.	Operator PNS	OB	500.000
7.	Operator Non PNS	OB	350.000

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI